

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PARIWISATA OLEH DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SINTANG

Yulia Anggraini*¹
E1032161046

Dra. Endang Indri Listiani, M.Si² Dr. Ira Patriani, M.Si²
***Email:yuliaanggraini746@gmail.com**

- 1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak**
- 2. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak**

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan kewenangan urusan pemerintahan bidang pariwisata oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang bahkan dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih adanya tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kaitan dengan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal tersebut terungkap bahwa berdasarkan aspek faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang mencakup 4 bagian yaitu Bentuk Komunikasi, Unsur Disposisi, Sumber Daya dan Aspek Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata belum berjalan secara optimal. Bentuk Komunikasi seperti rapat-rapat rutin, pembentukan panitia, diskusi-diskusi serta konsultasi kegiatan masih jarang dilakukan. Unsur Disposisi terutama respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan cukup tinggi, sedangkan pemahamannya terhadap kebijakan serta intensitas disposisi implementor, yakni prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor cukup baik. Sumber Daya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata di Kabupaten Sintang seperti anggaran dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana masih belum memadai. Kemudian Aspek Struktur Organisasi yaitu SOP, pembagian kewenangan dan uraian tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata di Kabupaten Sintang masih belum lengkap. Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dapat segera menyelesaikan persoalan terkait kewenangan dalam pengelolaan Destinasi Wisata, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan Ijin Usaha Pengelolaan Wisata Alam (IUPWA) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian komunikasi antara Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kabupaten Sintang perlu lebih dioptimalkan lagi, serta peningkatan sumber daya penting penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata seperti anggaran dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Pariwisata, Kewenangan, Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

The writing of this research aims to provide an understanding of the processes and factors that influence the administration of governmental affairs in the tourism sector by the local government, especially Youth, Sports and Tourism Office of Sintang Regency. The method used in this research is descriptive with qualitative analysis. Research results indicate that the tourism sector has not made a significant contribution to Locally-Generated Revenue of Sintang Regency, there is still an overlapping authority in the administration of governmental affairs in relation to the application of Law Number 23 of 2014. The revelation is based on the aspects of the factors that influence the implementation of governmental affairs in the tourism sector which includes 4 parts, namely Forms of Communication, Elements of Disposition, Resources and Aspects of the Organizational Structure of Youth, Sports and Tourism Office has not been running optimally. Forms of communication, such as routine meetings, committee formation, discussions and activity consultations are still rare. Disposition elements, especially the implementer's response to policies that will affect their willingness to implement policies are quite high, while their understanding of the policies and the intensity of the implementer's disposition, namely the value preference possessed by the implementer is quite good. Resources for administering Governmental Affairs in the Tourism Sector in Sintang Regency, such as budget and human resources as well as facilities and infrastructure, are still inadequate. Then, the Organizational Structure Aspects, namely SOP, division of authority and job descriptions of organizing governmental affairs in the tourism sector in Sintang Regency are still incomplete. It is recommended that Sintang Regency government, especially Youth, Sports and Tourism Office, can immediately resolve problems related to authority in managing tourist destinations. One of the efforts that can be made is to apply for Nature Tourism Management Business Permit to Ministry of Environment and Forestry. Furthermore, the communication between Youth, Sports and Tourism Office and the parties related to the implementation of Governmental Affairs in the Tourism Sector of Sintang Regency needs to be further optimized. Important resources for the administration of Governmental Affairs in the Tourism Sector such as budget and human resources as well as facilities and infrastructure need to be improved.

Keywords: Tourism, Authority, Local Government, and Locally-Generated Revenue

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah

Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas; (1) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan (2) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya, untuk urusan pemerintahan pilihan terdiri atas: Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Industri dan Urusan Transmigrasi. Berdasarkan uraian tersebut, walaupun Urusan Pariwisata merupakan urusan Pilihan, namun sektor ini memegang peranan penting dalam pembangunan daerah, terutama dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun peningkatan ekonomi masyarakat.

Memperhatikan ketentuan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dapat diketahui bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata cukup luas. Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang terus berupaya untuk menggalakkan sektor pariwisata. Namun demikian, dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang masih menghadapi kendala. Hal ini terlihat dari masih belum optimalnya Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Urusan Pariwisata di Kabupaten Sintang Tahun 2019.

Pariwisata merupakan sektor potensial di Kabupaten Sintang untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah, akan tetapi selama ini, sektor tersebut belum memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang. Hal ini tercermin dari kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2019 yang masih kecil yaitu hanya 2 %. Selain itu kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga relatif kecil. Padahal, sektor pariwisata dapat menjadi sektor unggulan dalam pergerakan perekonomian daerah jika dikelola dengan program dan direncanakan secara menyeluruh. Keunggulan letak geografis yang dimiliki Kabupaten Sintang dapat menjadi nilai tambah tersendiri bagi pengembangan sektor pariwisata. Untuk menuju ke tujuan pengembangan pariwisata yang terintegrasi, terencana dan komperhensif di Kabupaten Sintang, berbagai kendala serta permasalahan yang ada perlu mendapat perhatian, perhitungan, serta pemecahan tersendiri.

Salah satu kendala yang masih dihadapi untuk pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sintang adalah belum tersedianya aparatur yang

mempunyai kemampuan yang memadai dalam mengembangkan potensi kepariwisataan yang ada. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan rata-rata pegawai yaitu setingkat SLTA. Selain itu, dilihat dari bidang ilmu yang dimiliki, tidak terdapat pegawai yang berasal dari lulusan jurusan Pariwisata.

Permasalahan lain berkenaan dengan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sintang adalah potensi objek wisata tidak diikuti dengan peningkatan kualitas objek dan daya tarik wisata, seperti kebersihan, perawatan dan pemeliharaan objek, atraksi wisata serta industri kerajinannya. Seringkali pembangunan dan penataan suatu objek wisata oleh pemerintah Kabupaten Sintang akhirnya terlantar karena kurangnya pemeliharaan dan perawatan.

Kondisi tersebut tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintahan Kabupaten Sintang, khususnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai unit kerja yang secara langsung menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata di Kabupaten Sintang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, sehingga dapat memberikan kontribusi baik terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten

Sintang maupun terhadap pendapatan masyarakat.

2. KAJIAN TEORI

Menurut Sarundajang (2000, 18) pembagian urusan pemerintahan ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul Daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan hal tersebut, kemudian muncul konsep pendelegasian wewenang dalam organisasi pemerintahan. Dalam proses pendelegasian wewenang, Pemerintah harus melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyerahkan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh daerah.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata meliputi (1) Destinasi Pariwisata, (2) Pemasaran pariwisata, (3) Pengembangan Ekonomi Kreatif dan (4) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata oleh pemerintah kabupaten/kota akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Widodo (2006, 96) teori implementasi dari Model Edward III mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor *communication, resources, dispositions, dan bureaucratic structure*.

1. Faktor komunikasi

Komunikasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata oleh pemerintah kabupaten/kota diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata oleh pemerintah kabupaten/kota berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata oleh pemerintah kabupaten/kota juga mempunyai peranan penting. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata oleh pemerintah kabupaten/kota tersebut tidak akan efektif. Sumberdaya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

3. Disposisi

Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata oleh pemerintah kabupaten/kota bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan (*cognitive*) dan mereka sangat mendalam dan memahaminya (*comprehension and understanding*). Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima (*acceptance*), acuh tak acuh (*neutrality*), dan menolak (*rejection*) terhadap kebijakan. Sikap itulah yang

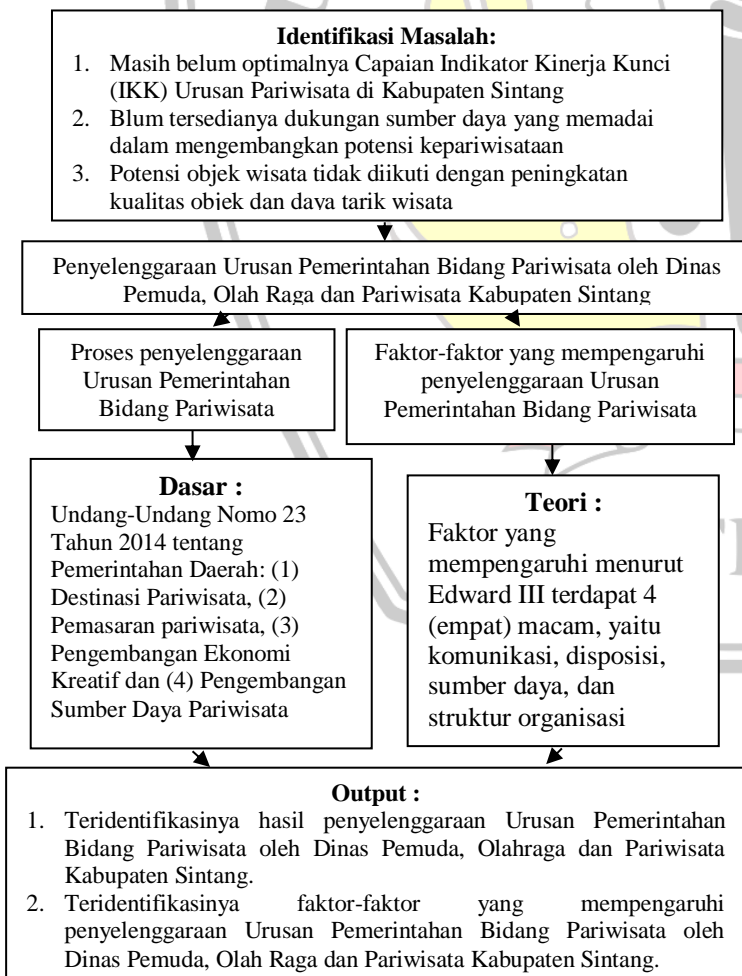
akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan. Disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata oleh pemerintah kabupaten/kota bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur birokrasi ini mencakup aspek- aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standar operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa

struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, di mana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar berita/instruksi nya akan terdistorsi. Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi kemampuan para pejabat pucak untuk mengoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yurisdiksi tertentu, akibat lebih lanjut adalah terjadinya ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya langka.

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Suryabrata (2000, 18) secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

1. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang
2. Kepala Seksi Promosi, Pemasaran dan Kerjasama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang
3. Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang
4. Pelaku Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Sintang

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah melalui pendekatan analisis kualitatif, karena dipandu oleh fakta-fakta

yang ditemukan dilapangan yang mana proses analisis data dilakukan terlebih dahulu dengan mengumpulkan data-data dilapangan, kemudian dipilah-pilah sesuai dengan apa yang menjadi pendukung dalam penelitian ini kemudian melakukan penganalisisan dengan menggunakan data yang diperoleh. Adapun proses analisis kualitatif meliputi:

- 1) Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi (dalam Sugiyono 2014, 92) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, selanjutnya mencari data tambahan apabila diperlukan.
- 2) Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data teorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
- 3) Penyimpulan (Verifikasi)
Merupakan tahap ketiga dari teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu kegiatan analisis data untuk menarik kesimpulan terhadap suatu temuan data-data dan informasi-informasi yang sebelumnya telah direduksi dan disajikan dengan data-data yang disusun secara

struktur. Verifikasi dimaksudkan untuk membuat kesimpulan data yang akurat untuk mendukung penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

4.1.1 Destinasi Wisata

Destinasi pariwisata merupakan unsur vital sekaligus penggerak utama bagi wisatawan dalam memutuskan perjalanan dan kunjungan ke suatu daerah. Destinasi pariwisata adalah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Hasil wawancara dengan dengan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang sebagai berikut:

“Untuk menunjang pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kabupaten Sintang tentunya kita harus mengetahui jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Sintang baik melalui keragaman potensi dan pengembangan wisata. Dalam upaya pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif tentunya dari jumlah potensi wisata yang ada di Kabupaten Sintang tersebut cermati secara teliti

dan akurat, sehingga akan diperoleh langkah-langkah sebagai upaya untuk pemetaan potensi dimaksud yang akan di klasifikasi sesuai dengan standar wisata yang akan dikembangkan.” (Wawancara pada hari Senin, 10 Mei 2020 pukul 10.00)

Kewenangan pengelolaan beberapa Destinasi Pariwisata di Kabupaten Sintang tidak sepenuhnya oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Sintang masih menghadapi kendala dan permasalahan. Salah satunya adalah terkait kewenangan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Alam Bukit Kelam yang menjadi unggulan destinasi wisata di Kabupaten Sintang. Sampai saat ini masih terdapat dualisme pemungutan Retribusi yaitu antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat.

4.1.2 Pemasaran Pariwisata

Pariwisata sangat erat kaitannya dengan pemasaran dan promosi, semakin sering melakukan pemasaran dan promosi baik dalam tingkat lokal maupun regional maka pariwisata di daerah tersebut akan semakin dikenal.

Dari hasil observasi memperlihatkan bahwa Realisasi Jumlah Wisatawan yang datang ke Kabupaten

Sintang menurut Bulan Tahun 2019 belum mencapai target yang ditetapkan. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Promosi, Pemasaran dan Kerjasama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang esbagai berikut:

“Strategi peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata di Kabupaten Sintang antara lain kita berupaya melakukan pengembangan pasar untuk wisatawan lokal kabupaten Sintang. Jika pasar ini telah tercapai sebelum kurun waktu perencanaan maka perlu juga di lakukan pengembangan pasar untuk wisatawan Kalimantan Barat, Nusantara dan Luar Negeri. Pengembangan dan peningkatan sistem informasi dan kualitas pemasaran dan promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh tentang semua produk wisata yang ada dan siap jual. Kita juga berupaya melakukan peningkatan mutu jasa dan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Kabupaten Sintang. Selain itu, juga melalui pengembangan paket paket wisata di Kabupaten Sintang dengan paket wista yang bervariasi baik wisata alam, budaya, minat khusus maupun lainnya.”

(Wawancara pada hari Selasa, 11 Mei 2020 pukul 09.30)

Dijelaskan oleh Kepala Seksi Promosi, Pemasaran dan Kerjasama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, dari strategi tersebut di atas, kebijakan peningkatan pemasaran dan promosi yang akan di terapkan dalam

pengembangan pariwisata di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

“Mengembangkan segmen pasar wisatawan Kabupaten Sintang berdasarkan kawasan wisata unggulan maupun produk wisata yang ditawarkan. Mengembangkan bentuk-bentuk pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik pasar wisatawan yang menjadi sasaran di kawasan wisata unggulan. Mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu, dengan tema yang jelas, secara terorganisir, efisien, dan efektif. Mengembangkan pemasaran dan promosi melalui teknologi informasi dan komunikasi sehingga bisa menjangkau wilayah yang lebih luas. Mengembangkan suatu paket-paket wisata dengan menggelar event-event wisata secara teratur sehingga wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Sintang dapat melihat dan menikmati beberapa obyek wisata secara sekaligus. Mengembangkan pola kerjasama promosi antar daerah dan dengan dunia usaha pariwisata. Mengikuti pelaksanaan event promosi di tingkat internasional, nasional, regional maupun penyelenggaraan kegiatan promosi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan festival kepariwisataan di daerah.”

(Wawancara pada hari Selasa, 11 Mei 2020 pukul 09.30)

Dari hasil observasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang tidak ada melakukan kegiatan kegiatan kerjasama dengan industri pariwisata. Kegiatan Pemasaran Pemasaran Pariwisata oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang melalui kerjasama seharusnya dapat dilakukan

kerjasama dengan Asosiasi pariwisata dan yang berhubungan dengan pariwisata baik secara nasional maupun yang ada di daerah seperti: Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), ASITA (Asosiasi Travel Agency), Lembaga sertifikasi Profesi Pariwisata dan Lembaga Studi Pariwisata.

4.1.3 Pengembangan Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif dan sektor wisata merupakan dua hal yang saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan seiring dengan pengembangan wisata.

Salah seorang pelaku usaha wisata di Kabupaten Sintang yang bergerak di bidang ekonomi kreatif menyatakan sebagai berikut:

“Potensi pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata di Kabupaten Sintang masih belum dapat diimplementasikan secara optimal. Kelemahan terbesar dari pengembangan ekonomi kreatif adalah minimnya upaya promosi dan tidak adanya link dengan industri kreatif untuk produksi souvenir. Wisatawan hanya sekedar datang dan pulang tanpa membawa sesuatu untuk dikenang (memorabilia) atau untuk dipromosikan pada calon wisatawan lainnya.”

(Wawancara pada hari Sabtu, 16 Mei 2020 pukul 09.30)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif dan

sektor wisata di Kabupaten Sintang masih berjalan secara terpisah. Ketiadaan linkage antara ekonomi kreatif dan sektor wisata dapat terlihat dari tiadanya tempat penjualan souvenir khas daerah. Walaupun ada, tempat penjualan souvenir dan souvenir yang dijual terkesan “biasa” saja, dan dapat dengan mudah ditemukan di daerah lain.

4.1.4 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Keberagaman jenis objek wisata dalam suatu kawasan wisata akan memiliki konsekuensi terhadap pengembangannya yang dominan di salah satu jenis objek wisata sehingga untuk mengetahui karakteristik objek wisata yang dominan dan potensial untuk dikembangkan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang sebagai berikut:

“Strategi pengembangan kelembagaan penunjang pariwisata Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut : Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga pemerintah, antara lembaga pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Sintang, Pengembangan lembaga pendidikan pariwisata sebagai pencetak sumber daya manusia pariwisata yang kompeten/berkualitas dan sesuai dengan tuntutan pasar serta Peningkatan koordinasi antar

lembaga pariwisata ataupun non pariwisata dengan pihak kedua (swasta dan masyarakat) dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Sintang.

(Wawancara pada hari Senin, 10 Mei 2020 pukul 10.00)”

4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Bidang Pariwisata

4.2.1 Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang kepada para pihak yang terkait dengan hal tersebut.

Berdasarkan hasil observasi bentuk komunikasi antara Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata seperti rapat-rapat rutin, pembentukan panitia, diskusi-diskusi serta konsultasi kegiatan masih jarang dilakukan serta dapat diketahui data terkait Pengembangan Kemitraan Strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata di Kabupaten Sintang masih sangat minim.

4.2.2 Disposisi

Unsur penting dalam disposisi adalah komitmen Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Bidang Pariwisata di Kabupaten Sintang. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang sebagai berikut:

“Komitmen kami dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata di Kabupaten Sintang adalah mewujudkan Kabupaten Sintang sebagai salah satu destinasi unggulan di wilayah Timur Kalimantan Barat, yang berdaya saing nasional dan mengarah ke global, selaras dengan rencana pembangunan, dikenal dan mempunyai posisi informatif yang berlandaskan atas kondisi alamiah lingkungan, pelestarian alam dan budaya, serta keberlanjutan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa komitmen pelaksana kebijakan dalam hal ini pimpinan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata di Kabupaten Sintang cukup tinggi. Unsur Disposisi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata oleh Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sintang terutama respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan cukup tinggi. Sedangkan pemahamannya terhadap kebijakan serta intensitas disposisi

implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor cukup baik.

4.2.3 Sumber Daya

Salah satu sumber daya penting penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata di Kabupaten Sintang adalah ketersediaan anggaran. Penyelenggaraan Urusan Pariwisata di Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2019 didukung oleh anggaran sebesar Rp 2.188.470.650,00. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran sebesar Rp 2.092.927.718,00 atau 95,63%.

4.2.4 Struktur Organisasi

Salah satu dari aspek struktur organisasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP), pembagian kewenangan dan uraian tugas yang menjadi pedoman bagi setiap orang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan dari hasil observasi, aspek struktur organisasi yang penting dari setiap organisasi yaitu prosedur operasi yang standar (SOP), pembagian kewenangan dan uraian tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata Di Kabupaten Sintang Oleh Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata belum tersedia secara lengkap.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan aspek faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bentuk Komunikasi Antara Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata dengan para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata di Kabupaten Sintang seperti rapat-rapat rutin, pembentukan panitia, diskusi-diskusi serta konsultasi kegiatan masih jarang dilakukan. Data terkait Pengembangan Kemitraan Strategis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata di Kabupaten Sintang masih sangat minim.
- b. Unsur Disposisi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata oleh Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Sintang terutama respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan cukup tinggi. Sedangkan pemahamannya terhadap

kebijakan serta intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor cukup baik.

- c. Sumber daya penting penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata di Kabupaten Sintang seperti anggaran dan sumber daya manusia serta Fasilitas atau Peralatan masih belum memadai.
- d. Aspek struktur organisasi yang penting dari setiap organisasi yaitu prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP), pembagian kewenangan dan uraian tugas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Di Kabupaten Sintang Oleh Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata belum tersedia secara lengkap.

5.2 Saran

1. Komunikasi Antara Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata dengan para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata di Kabupaten Sintang perlu lebih di optimalkan lagi.
2. Perlu membangun komitmen seluruh pihak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata khususnya dari DPRD Kabupaten

Sintang dan pihak-pihak terkait lainnya.

3. Perlu peningkatan sumber daya penting penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata di Kabupaten Sintang seperti anggaran dan sumber daya manusia serta Fasilitas atau Peralatan.
4. Perlu disusun prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP), pembagian kewenangan dan uraian tugas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Di Kabupaten Sintang Oleh Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

6. Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

6.1 Implikasi

Temuan penelitian ini mempunyai Implikasi teoritis yaitu masih adanya tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Impikasi praktis dari hasil penelitian ini bahwa sektor pariwisata belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sintang.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

Penelitian ini masih lebih difokuskan pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara umum yaitu (1) Destinasi Pariwisata, (2) Pemasaran pariwisata, (3) Pengembangan Ekonomi Kreatif dan (4) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.

Subjek penelitian yang diwawancarai lebih banyak kepada aparatur pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang sebagai pelaksana dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.

7. DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 2000. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wasistiono. 2015. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Dokumen :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2025

